

GLOBALISASI DAN NEGARA-BANGSA: KOMPETISI PERSPEKTIF GLOBALIS DAN SKEPTIS DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Poppy S. Winanti

The state...is both 'widening and withering' simultaneously
(Rosenau dalam White et.al (ed.): 1997).

Globalisasi kini menjadi kata yang kerap muncul, baik dalam perbincangan politik tingkat tinggi hingga percakapan sehari-hari. Suatu pidato politik kenegaraan dirasakan tidak lengkap tanpa kata globalisasi. Sebuah penelitian akademis dianggap kurang memadai tanpa menyebut konsep ini. Bahkan perbincangan di tingkat rukun tetangga serasa belum cukup jika tidak menyentuh istilah tersebut. Pendek kata, akhir-akhir ini globalisasi menjadi kata lumrah yang hampir dapat ditemui dalam kehidupan keseharian kita.

Meskipun istilah globalisasi baru mulai marak penggunaannya pada dua dekade terakhir, namun sesungguhnya kemunculan konsep ini dapat ditelusuri kembali pada beberapa periode jauh sebelumnya. Konsep ini pada awalnya berasal dari pemikiran kaum intelektual pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dari pemikiran Saint Simon, seorang sosiolog hingga ahli geopolitik seperti MacKinder, yang mengawali studi tentang moder-

alitas dunia yang kian terintegrasi. Akan tetapi baru pada tahun 1960-an dan awal 1970-an sesungguhnya istilah globalisasi mulai banyak digunakan, ketika perluasan dan percepatan ketergantungan ekonomi dan politik mencapai masa emas (Held dan McGrew dalam Held dan McGrew (ed.): 2000).

Globalisasi merupakan konsep yang kontroversial. Kontroversial, tidak hanya dari segi bagaimana memahami konsep

*) Poppy S. Winanti. Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol UGM dan Peneliti *Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta*

tersebut, namun juga implikasi yang ditimbulkannya. Ini setidaknya tampak dari tidak adanya suatu pemahaman umum yang disepakati oleh para ahli politik dalam mendefinisikan konsep tersebut. Beberapa ahli politik memahaminya sebagai suatu fase sementara dari sejarah umat manusia, sementara yang lainnya memandang globalisasi tidak lebih dari sekedar wujud terakhir dari pertumbuhan kapitalisme Barat dan modernisasi. Ada pula yang melihatnya tidak lebih sebagai proses Amerikanisasi dan Westernisasi. Sementara dari segi implikasi, sebagian memandang, globalisasi merupakan proses menuju penyeragaman dunia yang hasil akhirnya adalah penyerataan dunia. Namun, tidak sedikit juga yang menengarai globalisasi sebagai suatu proses yang kian memperlebar kesenjangan dunia.

Implikasi yang paling sering disebut-sebut dari kehadiran globalisasi adalah kaburnya batas-batas negara dan semakin berkurangnya kedaulatan negara-bangsa yang diiringi dengan kian terintegrasinya masyarakat dunia menjadi satu komunitas tunggal yakni masyarakat global. Sehingga, konsekuensi logis dari implikasi ini adalah hilangnya negara-bangsa dari panggung politik internasional.

Tulisan ini mencoba untuk

menggali lebih jauh perdebatan di seputar, apakah globalisasi menyebabkan hilangnya negara-bangsa dari dunia internasional? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh negara-bangsa di era globalisasi? Tawaran-tawaran apa yang dapat diberikan kepada negara-bangsa untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama akan mendiskusikan tentang konsep globalisasi itu sendiri yang didalamnya akan menguraikan apa yang dimaksud dengan globalisasi beserta karakteristiknya. Bagian kedua akan menampilkan beberapa perspektif dalam studi hubungan internasional dalam memahami fenomena ini. Ada dua perspektif dominan dalam studi hubungan internasional yang saling berkompetisi dalam menjelaskan fenomena globalisasi, yakni perspektif globalis dan skeptis. Pada bagian ini akan diuraikan pula perspektif transformasionalis yang seringkali dipercaya sebagai jalan tengah dari dua perspektif dominan sebelumnya. Bagian selanjutnya akan mengungkap perdebatan tentang globalisasi dan tantangan yang dihadapi negara-bangsa serta tawaran-tawaran yang mungkin dapat dilakukan oleh

negara-bangsa dalam menjawab tantangan-tantangan global.

Globalisasi: Definisi dan Karakteristik

Globalisasi merupakan proses sejarah yang muncul sebagai konsekuensi logis dari kemajuan dan inovasi teknologi, serta perkembangan komunikasi dan informasi. Konsep ini secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses yang terkait dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan semakin mendalamnya saling ketergantungan dan keterkaitan antar manusia yang lintas batas negara.

Baylis dan Smith mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat sehingga satu peristiwa yang terjadi di salah satu wilayah tertentu semakin lama akan kian berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat yang hidup di bagian lain di muka bumi ini (Baylis dan Smith (ed.), 1999). Senada dengan Baylis dan Smith, sosiolog terkemuka Anthony Giddens memandang globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang ditandai dengan semakin tingginya intensitas hubungan sosial yang mengglobal dimana kehidupan manusia di suatu wilayah akan ber-

pengaruh pada kehidupan manusia di wilayah lain dan begitu pula sebaliknya. Lebih lanjut Giddens percaya bahwa globalisasi adalah proses yang akan berakhir dengan penyetaraan sosial sebab proses ini memberi ruang pada kelompok-kelompok dan negara-negara yang tidak berdaya untuk menyadari potensi dan peluang dalam mencapai tujuan mereka¹.

Sementara Holm dan Sørensen memahami globalisasi sebagai semakin meningkatnya intensitas hubungan lintas batas negara baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Holton: 1998). Di sisi lain, Wallerstein sang pelopor teori sistem dunia memandang, globalisasi tidak lebih sebagai wujud dari kejayaan ekonomi kapitalis dunia yang digerakkan oleh logika akumulasi kapital (Holton: 1998).

Sedangkan definisi yang lebih komprehensif dapat ditemui pada pendapat yang diajukan oleh Held (et.al). Menurut Held (et.al) globalisasi adalah:

A process (or a set of processes) which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and transactions – assessed in terms of their extensive, intensive, velocity, and impact – generating transcontinental or interre-

1. <http://www.sociologyonline.co.uk/GlobaliGiddens1.htm>

gional flows and networks of activity, interaction, and the exercise of power (Held (et.al) dalam Held dan McGrew (ed.): 2000).

Dalam konteks ini, arus merujuk pada pergerakan artifak fisik, manusia, simbol, mata uang, dan informasi yang lintas batas ruang dan waktu. Sementara jaringan merujuk pada pola dan tata aturan interaksi antara aktor-aktor independen beserta aktivitas dan lingkup kekuasaannya.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, kian tampak tidak adanya satu pemahaman mengenai globalisasi yang disepakati secara umum oleh para ahli politik. Namun, dari beberapa definisi tersebut setidaknya dapat disimpulkan bahwa globalisasi mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: *pertama*, terkait erat dengan kemajuan dan inovasi teknologi, arus informasi serta komunikasi yang lintas batas negara. *Kedua*, tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kapital, semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global. *Ketiga*, berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia dan pertukaran budaya yang lintas batas negara. *Keempat*, ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan dan ketergantungan tidak hanya antar bangsa namun juga antar masyarakat.

Singkatnya, globalisasi bukan hanya sekedar fenomena ekonomi yang terkait dengan produksi, akumulasi kapital, perdagangan, dan pasar global. Akan tetapi, globalisasi juga merupakan fenomena sosial dan budaya yang melibatkan proses penyebaran ide, nilai, norma, gaya hidup, ideologi, dan juga kepercayaan. Sebagai sebuah proses yang multidimensi, globalisasi tentu saja mempunyai dampak yang sangat luas tidak hanya bagi keberadaan negara-bangsa, namun juga hubungan antar negara-bangsa, hingga pada level yang menyentuh kehidupan keseharian umat manusia.

Untuk memahami lebih jauh mengenai implikasi globalisasi khususnya pada keberadaan negara-bangsa, penting kiranya untuk mengulas beberapa perspektif dominan dalam studi hubungan internasional. Bagian berikutnya dari tulisan ini akan mengulas secara lebih mendalam dua perspektif dalam kajian studi ilmu hubungan internasional (yaitu globalis dan skeptis) dalam memahami globalisasi dan pengaruh yang ditimbulkannya terhadap eksistensi negara-bangsa.

Globalis dan Skeptis: Dua perspektif dominan

Kaum globalis memandang globalisasi yang berakar dari terintegrasinya ekonomi dunia ke dalam satu ekonomi dunia global telah mentransformasikan asal mula dan bentuk kekuatan politik negara-bangsa (Held dan McGrew (ed.): 2000). Kemunculan fenomena ini menyebabkan pemerintah dan masyarakat dunia di mana pun, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi akibat dari makin kaburnya perbedaan antara ranah domestik dan internasional maupun perbedaan antara urusan-urusan eksternal dan internal. Ketidaktegasan batas-batas teritorial negara telah mempengaruhi kekuasaan, fungsi, dan otoritas pemerintahan nasional yang pada gilirannya menyebabkan menurunnya kedaulatan dan legitimasi negara-bangsa.

Negara kemudian hanyalah merupakan subyek dari proses perubahan ekonomi dan politik global yang masif, sehingga lambat laun negara tidak lagi menjadi "*decision makers*" melainkan menjadi "*decision takers*"². Dalam kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika kaum globalis lantas beragumen bahwa glo-

balisasi telah mengakhiri kejayaan kaum realis dengan konsep negara-bangsa Westphalian-nya yang selama ratusan tahun menjadi pendekatan dominan dalam studi hubungan internasional.

Konsep negara-bangsa ala Westphalian yang menempatkan negara-bangsa sebagai sebuah institusi yang mempunyai klaim atas kedaulatan politik formal pada teritori tertentu dan mendasarkan legitimasinya pada orang dan negara yang hidup di wilayah tersebut (Mann dalam Held dan McGrew (ed.): 2000), dianggap oleh kaum ini tidak lagi mampu menjelaskan fenomena dunia internasional kontemporer. Klaim kedaulatan negara-bangsa atas teritori tertentu, independensi pemerintah nasional, dan peran tunggal negara-bangsa dalam panggung politik dunia menjadi inti dari kritik kaum globalis. Bagi kaum globalis, kedaulatan, teritori, dan independensi negara-bangsa menjadi kata-kata yang tidak lagi punya makna ditengah situasi makin kaburnya batas-batas teritori dan kian tingginya tingkat keterkaitan dan ketergantungan antar negara.

Belum lagi kemunculan aktor-aktor internasional baru, semacam *International Governmen-*

2. <http://www.polity.co.uk/global/executiv.htm>

tal Organization (IGO), *International Non-Governmental Organization* (INGO), perusahaan-perusahaan multinasional, maupun organisasi-organisasi kekerasan internasional seperti halnya teroris, punya pengaruh yang tidak kalah besar dengan peran negara-bangsa dalam panggung politik dunia internasional. Kemunculan resiko-resiko baru seperti penyakit menular dan persoalan-persoalan lingkungan, turut memperlemah posisi negara-bangsa karena persoalan-persoalan ini tidak lagi dapat ditangani oleh negara-bangsa secara individual.

Berlawanan dengan posisi yang diambil kaum globalis, kaum skeptis memandang globalisasi hanyalah omong kosong belaka, jika tidak dapat dikatakan sebagai mitos atau ilusi. Kaum ini menolak dengan keras anggapan kaum globalis yang memandang fenomena globalisasi sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam sejarah perkembangan umat manusia. Bagi kaum ini, dunia internasional kontemporer hanya merupakan kelanjutan dari proses yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya.

Kaum skeptis yang pemikiran politiknya berakar dari tradisi perspektif realis ini beranggapan bahwa negara-bangsa sebagai

satu-satunya insitusi politik dalam panggung politik dunia akan tetap mempunyai peran yang tidak berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Tantangan-tantangan baru yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, maupun ekonomi global tidak menyebabkan hilangnya sistem dunia yang berpusat pada negara-bangsa (Held dan McGrew (ed.): 2000). Bahkan, proses globalisasi yang tengah berlangsung dengan semakin meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan antar negara kian mengukuhkan posisi sentral negara-bangsa.

Kemunculan aktor-aktor internasional baru bagi kaum ini tidak serta merta menghapuskan peran negara dalam panggung dunia internasional. Sebagai salah satu contoh, selama ini aktivitas INGO adalah berupaya untuk mempengaruhi kebijakan negara-bangsa demi menyuarakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini, pengusung perspektif ini berargumen, peran INGO tetap tidak dapat dilepaskan dari keberadaan negara-bangsa dan bahkan justru kian menegaskan posisi negara-bangsa sebagai satu-satunya institusi politik yang mempunyai otoritas dan legitimasi atas masyarakatnya.

Sedangkan berkaitan dengan

kemunculan IGO, kaum skeptis berpendapat bahwa IGO diciptakan oleh negara-bangsa untuk melayani kepentingan kepentingan politik mereka. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa IGO juga dibentuk oleh negara-bangsa untuk melaksanakan fungsi-fungsi legal dari kedaulatan internasional negara bangsa. Karenanya, adalah salah besar jika IGO dikatakan sebagai pengganti negara-bangsa, mengingat keberadaan lembaga-lembaga tersebut hanya merupakan alat bagi negara-bangsa itu sendiri³. Sementara berkaitan dengan kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional, kaum ini berpendapat, perusahaan-perusahaan yang beroperasi lintas batas negara ini tidak lebih sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan ekonomi nasional negara-negara asal mereka.

Lebih lanjut kaum ini berpendapat, globalisasi tidak lebih sebagai ideologi yang disebarluaskan oleh para pendukung pasar bebas yang ingin membongkar sistem kesejahteraan dan mengurangi pengeluaran negara (Giddens: 2000). Terintegrasinya ekonomi dunia ke dalam sistem ekonomi global

yang diarsiteki oleh negara-negara OECD, dicurigai sebagai upaya negara-negara kaya tersebut untuk menciptakan sistem ekonomi internasional yang lebih liberal dan terbuka. Alih-alih terciptanya sistem ekonomi global yang tunggal, kaum skeptis memandang dunia kontemporer justru terpecah ke dalam beberapa blok utama, baik blok ekonomi maupun politik⁴.

Menanggapi kritik kaum globalis atas konsep-konsep kedaulatan, otoritas, dan legitimasi negara bangsa yang berakar pada konsep Westphalian, kaum skeptis terutama diwakili oleh Krasner, memandang kritik ini muncul justru karena ada kesalahpahaman dalam memahami konsep kedaulatan Westphalian itu sendiri (Krasner dalam Held dan McGrew (Ed.): 2000).

The Peace of Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun pada tahun 1648, menandai dimulainya sistem internasional modern sebagai tatanan universal kedaulatan negara-bangsa yang mempunyai otoritas di dalam batas-batas teritorinya masing-masing. Model Westphalian yang berdasarkan pada asumsi neo-realisme dan neo-li-

3. Lebih jauh mengenai kemunculan aktor-aktor internasional baru dan kaitannya dengan keberadaan negara-bangsa lihat Krasner, "Globalization, Power, and Authority", makalah disampaikan pada *the American political Science Association Annual Meeting, San Francisco* 29 Agustus - 2 September 2001.

4. *Op.cit.*

beral institutionalis menganggap negara sebagai aktor yang otonom, tunggal, dan rasional. Namun, Krasner berargumen bahwa sejarah menunjukkan model Westphalian tidak pernah menjadi deskripsi yang paling akurat bagi konsep negara-bangsa. Artinya, sejak model ini mulai diterapkan yang terjadi adalah beberapa kompromi baik melalui konvensi, koersi, maupun melalui imposisi, sehingga pada realitasnya model ini memang tidak pernah dapat diterapkan secara murni.

Oleh karena itu, Krasner beranggapan bahwa kritik kaum globalis muncul karena kesalahan dari kaum ini yang memandang model Westphalian sebagai model ideal dan sebagai bagian dari realitas historis. Karenanya oleh kaum globalis, kemunculan globalisasi dianggap sebagai ancaman bagi negara-bangsa dan bahkan menandai berakhirnya kejayaan model Westphalian. Padahal sesungguhnya menurut Krasner, kompromi terhadap model Westphalian merupakan isu lama dalam dunia internasional dan apa yang disebut sebagai kejayaan model Westphalian tidak pernah ditemui dalam sejarah perkembangan dunia. Kondisi ini dipengaruhi oleh realitas dunia internasional yang

sejak dulu diwarnai oleh kekuasaan antar negara yang asimetris dan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas tiap-tiap negara. Singkatnya menurut Krasner, anggapan bahwa hilangnya kedaulatan, otoritas, dan legitimasi negara-bangsa akibat dari globalisasi adalah anggapan yang salah kaprah karena sejak dulu negara-bangsa memang tidak pernah memiliki kedaulatan, otoritas, dan legitimasi dalam tataran yang ideal.

Ringkasnya, perbedaan kedua perspektif dominan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Di samping dua perspektif dominan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat perspektif ketiga yang sering dipercaya sebagai sebuah jalan tengah bagi perdebatan dua perspektif dominan tersebut, yaitu transformasionalis. Globalisasi bagi kaum transformasionalis tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan dalam ekstensitas atau skala hubungan dan aktivitas sosial. Lebih dari itu, globalisasi juga terkait dengan lingkup reorganisasi dan re-artikulasi kekuasaan ekonomi, politik, militer, dan budaya⁵. Oleh karena itu, kaum ini percaya bahwa globalisasi menciptakan kondisi ekonomi, politik, dan sosial baru, yang meski perlu diakui sebagai

5. *Ibid.*

Tabel 1. Globalisasi: Perspektif Skeptis dan Globalis

	Skeptis	Globalis
Konsep	Internasionalisasi dan regionalisasi (bukan globalisasi)	Satu dunia yang dibentuk oleh tingginya ekstensifikasi, intensifikasi, dan percepatan arus, pergerakan dan jaringan lintas batas wilayah dan benua
Kekuasaan	Negara-bangsa, <i>inter-governmentalism</i>	Kian berkurangnya kedaulatan, otonomi, dan legitimasi negara
Budaya	Kebangkitan kembali nasionalisme dan identitas nasional	Kemunculan budaya populer global, menurunnya identitas politik yang kaku, munculnya proses hibridisasi
Ekonomi	Berkembangnya blok-blok regional, <i>triadization</i> , imperialisme baru	Kapitalisme informasi global, ekonomi transnasional, <i>global division of labour</i> yang baru
Kesenjangan	Kian lebarnya perbedaan antara Utara dan Selatan, tidak dapat didamaikannya konflik kepentingan	Kian lebarnya kesenjangan di dalam maupun antar masyarakat, tererosinya hirarki lama
Tatanan	Masyarakat internasional yang berbasis negara, tetap bertahannya konflik politik antar negara, <i>international governance</i> dan geopolitik, komunitarianisme	<i>Multilayered global governance</i> , masyarakat sipil global, <i>global polity</i> , kosmopolitanisme

Sumber: Held dan McGrew dalam Held dan McGrew (ed.): 2000

sebuah proses yang timpang, telah mentransformasikan kekuasaan negara beserta konteks di mana negara beroperasi, yaitu

dunia politik internasional.

Meskipun kaum ini berargumen bahwa politik internasional tidak lagi secara sederhana ha-

nya dapat didasarkan pada negara-bangsa, namun kaum ini tidak sepakat dengan kaum globalis yang percaya bahwa globalisasi merupakan lonceng kematian bagi sistem negara-bangsa. Namun pada saat yang sama, kaum ini juga tidak setuju dengan pendapat dari kalangan skeptis yang justru melihat globalisasi kian mengukuhkan peran negara-bangsa. Golongan transformasionalis lebih percaya bahwa globalisasi telah mentransformasikan peran negara-bangsa. Oleh karenanya, penting bagi negara-bangsa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kaum ini juga tidak menyepakati argumen kaum globalis yang melihat dunia telah terintegrasi ke dalam satu sistem ekonomi global. Di pihak yang lain, pengusung perspektif transformasionlis juga tidak dapat menerima klaim kaum skeptis yang percaya bahwa globalisasi justru telah menyebabkan dunia terbagi-bagi ke dalam beberapa blok ekonomi berdasarkan kewilayahan. Namun kaum ini lebih melihat globalisasi sebagai sebuah proses yang membawa dunia ke dalam integrasi global sekaligus pada saat yang bersamaan juga mendorong terciptanya dunia yang terfragmentasi. Karena kaum ini percaya bahwa globalisasi merupakan proses

multidimensi yang tidak dapat dipahami hanya dengan logika ekonomi semata yang tentu saja mempunyai dampak yang berbeda pada tiap-tiap wilayah di dunia maupun negara-bangsa secara individual.

Terlepas dari sejumlah perbedaan yang mewarnai perdebatan beberapa perspektif dalam memahami globalisasi, namun setidaknya ada beberapa hal yang tampaknya disepakati oleh perspektif-perspektif tersebut, yakni (Held dan McGrew dalam Held dan McGrew (ed.): 2000):

1. Terdapat sejumlah perkembangan pada beberapa dekade terakhir yang berkenaan dengan saling keterkaitan ekonomi di dalam maupun antar wilayah, meskipun proses ini sangat bervariasi dan membawa konsekuensi yang juga berbeda-beda pada komunitas yang berbeda pula.

2. Kompetisi (politik, ekonomi, dan budaya) inter-regional dan global memberikan tantangan baru bagi hirarki lama dan menumbuhkan ketimpangan baru dari segi kemakmuran, kekuasaan, hak istimewa, dan pengetahuan,

3. Persoalan-persoalan transnasional dan lintas batas negara seperti misalnya penyebaran bahan pangan hasil rekayasa genetik, pencucian uang, yang kian meningkat, menimbulkan

pertanyaan atas peran, fungsi, dan akuntabilitas kelembagaan tradisional dari pemerintahan nasional.

4. Terdapat ekspansi *international governance* pada tingkat regional maupun global – dari Uni Eropa hingga WTO – yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan normatif yang signifikan akan tatanan dunia macam apa yang tengah dibangun dan demi melayani kepentingan siapa.

5. Perkembangan-perkembangan yang terjadi ini pada akhirnya bermuara pada munculnya tuntutan akan cara berpikir baru tentang perubahan politik, ekonomi, maupun budaya. Perkembangan-perkembangan ini juga menuntut adanya respon imajinatif dari pada politisi dan pembuat kebijakan tentang kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang termasuk apa bentuk yang paling efektif dari regulasi politik dan akuntabilitas demokrasi.

Berdasarkan poin-poin kesepakatan tersebut, satu hal penting yang dapat disimpulkan adalah globalisasi telah mendorong terjadinya transformasi peran negara-bangsa dan dunia politik internasional tempat negara-bangsa beroperasi. Bagian berikutnya dari tulisan ini akan memfokuskan diri pada pembahasan mengenai tantangan-

tantangan apa yang dihadapi oleh negara-bangsa sekaligus mencoba memberikan tawaran-tawaran politik bagi negara-bangsa dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Negara-bangsa di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Sebelum memulai pembicaraan mengenai tawaran-tawaran politik macam apa yang dapat dilakukan oleh negara-bangsa, bagian ini akan diawali dengan pembahasan mengenai tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh negara-bangsa di era globalisasi.

Menurut Mann (Mann dalam Held dan McGrew (ed.): 2000) terdapat empat faktor utama yang melemahkan kondisi negara-bangsa, yakni: *pertama*, ancaman kapitalisme global, didalamnya termasuk transnasionalisme, *post-industrial*, masyarakat informasi, dan neo-liberalisme. *Kedua*, ancaman populasi dan persoalan-persoalan lingkungan atau munculnya masyarakat yang hidup dalam resiko-resiko baru. *Ketiga*, identitas politik, gerakan sosial baru, atau kemunculan masyarakat sipil transnasional. *Keempat*, *post-militerism*, yakni munculnya dominasi baru tanpa melalui perang namun melalui

kekuatan lain seperti kekuatan ekonomi.

Senada dengan apa yang dikemukakan Mann, Scholte (Scholte dalam Baylis dan Smith (ed): 1997) berpendapat, negara-bangsa kontemporer menghadapi fenomena-fenomena baru dalam dunia internasional seperti misalnya hadirnya perusahaan multinasional, kemunculan persoalan-persoalan lingkungan, maupun semakin meluasnya perdagangan global. Negara juga tidak hanya kesulitan dalam mengendalikan persoalan-persoalan yang terkait dengan perubahan yang sifatnya material atau fisik. Namun negara juga menghadapi persoalan yang sifatnya non-fisik menyangkut masalah psikologi dan budaya, seperti kemunculan etno-nasionalisme, berkembangnya isu-isu dan nilai-nilai transnasional seperti hak asasi manusia.

Kondisi negara-bangsa dalam dunia kontemporer dapat digambarkan oleh Scholte seperti tampak dalam Gambar 1.

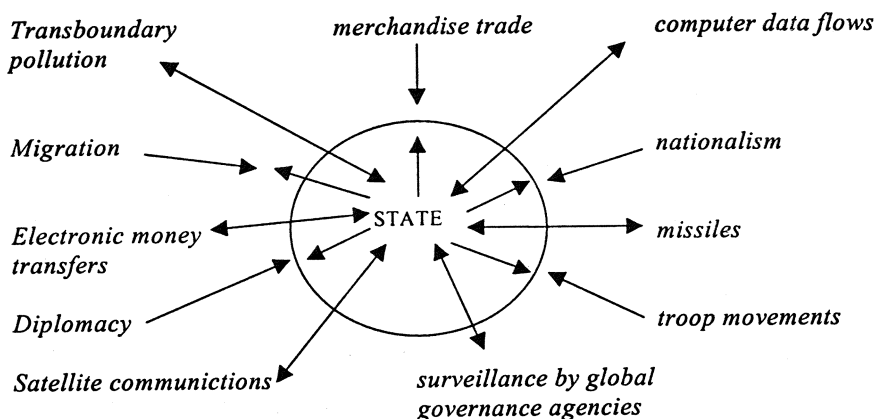
Sementara itu berdasarkan isu-isu utamanya, Held membagi tantangan yang dihadapi negara-bangsa ke dalam empat isu besar (tabel 2).

Meskipun negara-bangsa secara umum menghadapi tantangan yang luar biasa, namun untuk menjawab pertanyaan apakah tantangan-tantangan

tersebut menyebabkan semakin melemahnya atau sebaliknya memperkuat negara bangsa tidaklah mudah. Ini karena seperti yang dikemukakan Mann, tantangan-tantangan tersebut mempunyai dua potensi, memperlemah sekaligus memperkuat keberadaan negara-bangsa. Ini karena tantangan-tantangan tersebut mempunyai dampak yang berbeda-beda bagi setiap negara-bangsa, sehubungan dengan kondisi tiap negara yang juga bervariasi baik dari segi ukuran, kekuasaan, kondisi geografis, derajat sentralisasi, derajat demokrasi, maupun tingkat pembangunan dan kemakmurannya (Mann dalam Held dan McGrew (ed.): 2000).

Di tengah-tengah kondisi yang boleh dibilang rawan tersebut, negara-bangsa tetap mempunyai peluang untuk tetap eksis. Sebab, sesungguhnya masih terdapat sejumlah peran-peran signifikan yang dapat dilaksanakan oleh negara-bangsa, seperti misalnya peran-peran yang berkaitan dengan penarikan pajak domestik, regulasi, lisensi, maupun melakukan penolakan dan pembatasan terhadap akses pihak asing. Singkatnya, negara tetap punya peran yang sangat signifikan dalam hal merancang aturan-aturan dasar dan pengkondisian lingkungan bagi beroperasinya kekuatan ekonomi

Gambar 1. Negara dalam dunia globalisasi



Sumber: Scholte dalam Baylis dan Smith (ed.): 2000

Tabel 2. Tantangan-tantangan terhadap negara-bangsa.

Ekonomi global	Perusahaan multinasional, pasar kapital global
Lembaga-lembaga transnasional	Lembaga-lembaga regulator ekonomi (seperti misalnya Bank Dunia dan WTO), PBB, Uni Eropa
Hukum Internasional	Konvensi hukum yang diakui oleh peradilan nasional dan negara-negara, PBB, Uni Eropa, konvensi-konvensi dan charter
Kekuasaan hegemoni dan blok-blok kekuatan	NATO dan bekas anggota Pakta Warsawa

Sumber: Holton: 1998

transnasional (Webber dalam White et.al (ed.): 1997). Terlebih jika mengingat hingga saat ini, masih belum adanya alternatif atau institusi lain yang riel pengganti negara-bangsa, baik sebagai tatanan unit dalam sistem internasional maupun sebagai kerangka dasar bagi pemerintahan domestik.

Meskipun demikian, penting bagi negara-bangsa untuk memikirkan kembali atau mentransformasikan dirinya sebagai respon atas tuntutan dan perkembangan jaman. Dengan kata lain, demi kelangsungan hidupnya, penting bagi negara-bangsa untuk mempertahankan diri sebagai institusi yang mampu-

punyai kapasitas untuk bertindak dalam rangka meraih keunggulan bagi kepentingannya. Kapasitas tersebut meliputi area yang cukup luas mulai dari penyediaan aturan-aturan ekonomi, regulasi hubungan industri, kebijakan fiskal, hingga kapasitas yang terkait dengan legitimasi pengaturan kelembagaan tertentu (Holton: 1998).

Penutup

Situasi politik dunia kontemporer yang ditandai dengan fenomena globalisasi membawa pengaruh yang cukup berarti bagi keberadaan negara-bangsa. Dua perspektif dominan dalam studi hubungan internasional, globalis dan skeptis, masing-masing berada pada titik ekstrim dalam menjelaskan keberadaan negara-bangsa pada era globalisasi ini. Sehingga, kedua perspektif tersebut tidak mampu menjelaskan kondisi politik dunia internasional yang sedemikian kompleksnya secara menyeluruh. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelemahan dari satu perspektif boleh jadi merupakan kelebihan dari yang lain dan sebaliknya. Justru itulah, kedua perspektif tersebut sesungguhnya dapat saling melengkapi.

Di luar perdebatan perspektif-perspektif tersebut, realitas poli-

tik internasional kontemporer menunjukkan, negara-bangsa bukan lagi merupakan satu-satunya aktor dominan dalam politik internasional. Negara-bangsa juga tidak lagi dapat mengklaim kedaulatan atas teritori dan war-ganya secara absolut. Namun ini juga tidak berarti bahwa negara-bangsa merupakan konsep yang tidak lagi relevan dibicarakan sebagai unit politik dalam politik internasional. Negara-bangsa tetap mempunyai peran yang signifikan meskipun (tentu saja) tidak lagi dominan. Oleh karena itu, redefinisi konsep kedaulatan negara-bangsa menjadi sesuatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Kedaulatan negara bangsa – meminjam istilah Keohane – tidak lagi dapat didefinisikan terbatas berdasarkan pada kontrol atas batas-batas teritori tertentu. Melainkan harus dipandang dari segi yang lebih fungsional yakni kapasitas untuk melakukan posisi tawar dan membuat regulasi dalam jaringan transnasional yang sangat kompleks.

Daftar Pustaka

....., "Globalization", <http://www.sociologyonline.co.uk/GlobalGiddens1.htm>

Baylis, John dan Steve Smith dalam John Baylis dan Steve Smith (ed.), *The Glo-*

balization of World Politics an Introduction to International Relations, Oxford University Press, New York: 1997.

Giddens, Anthony, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.

Held, David (et.al), "Rethinking Globalization" dalam David Held dan Anthony McGrew (ed.), *The Global Transformations Reader an Introduction to the Globalization Debate*, Polity Press dan Blackwell Publisher, Ltd., Cambridge: 2000.

Held, David dan Anthony McGrew, "Executive Summary", <http://www.polity.co.uk/global/executiv.htm>

Held, David dan Anthony McGrew, "Globalization", <http://www.polity.co.uk/global/>

Holton, Robert J., *Globalization and Nation State*, Macmillan Press, Ltd., London: 1998.

Krasner, Stephen D., "Compromising Westphalia",

dalam David Held dan Anthony McGrew (ed.), *The Global Transformations Reader an Introduction to the Globalization Debate*, Polity Press dan Blackwell Publisher, Ltd., Cambridge: 2000.

Krasner, Stephen D., "Globalization, Power, and Authority", makalah disampaikan pada *the American political Science Association Annual Meeting*, San Francisco, 29 Agustus - 2 September 2001.

Mann, Michael, "Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?" dalam David Held dan Anthony McGrew (ed.), *ibid.*

Scholte, Jan Aart, "The Globalization of World politics", dalam John Baylis dan Steve Smith (ed.), *The Globalization of World Politics an Introduction to International Relations*, Oxford University Press, New York: 1997.

White, Brian, et.al., (ed.), *Issues in World Politics*, Macmillan Press, Ltd., London: 1997.